

	News Title : Lindungi Masyarakat dari Investasi Ilegal, Kemendag Tertibkan Robot Trading tidak Berizin	
	Media Name : Pikiran Rakyat Online	Journalist : Roslery Sondakh
	Publish Date : 29 January 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 3,000,000
	Resources : Veri Anggrijono (Dirjan PKTN), Sihard Hadjopan Pohan (Direktur Tertib Niaga), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti)	Ads Value : 1,000,000
	Section/Rubrication : Nasional	Topic : Robot Trading

Lindungi Masyarakat dari Investasi Ilegal, Kemendag Tertibkan Robot Trading tidak Berizin

Roslery Sondakh - 29 Januari 2022, 13:28 WIB



Lindungi Masyarakat Kemendag tertibkan robot trading tidak berizin. /Laman Kemendag

PORTAL BOLMONG— Kementerian Perdagangan ([Kemendag](#)) bertindak tegas terhadap usaha penjualan expert advisor/[robot trading](#) tidak berizin.

Penertiban tersebut, merupakan upaya [Kemendag](#) melindungi masyarakat dari investasi [illegal](#).

Tindakan tegas Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) dan Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti), [Kemendag](#) dilakukan kepada PT DNA Pro Akademi, Jumat 28 Januari 2022, di Jakarta.

"Kegiatan penertiban ini merupakan hasil temuan pengawasan terhadap PT DNA Pro Akademi.

PT ini telah menjalankan kegiatan usaha penjualan expert advisor/[robot trading](#) dengan menggunakan system MLM," kata Dirjan PKTN Veri Anggrijono, dilansir Portal Bolmong dari laman [Kemendag](#), Sabtu 29 Januari 2022.

Baca Juga: [Kemenkes Terbitkan Sertifikat Vaksin Internasional, Ini cara Akses dan Mengunduhnya](#)

"Atas dasar legalitas berupa nomor induk berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 47999 (perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima, dan los pasar lainnya) yang belum berlaku secara efektif, terverifikasi, atau tidak memiliki izin usaha penjualan langsung," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Tertib Niaga Sihard Hadjopan Pohan menjelaskan, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,

kegiatan usaha penjualan langsung termasuk dalam kategori risiko tinggi.

Baca Juga: [Direstui Kemenkes, Kenali Jenis-jenis Vaksin COVID-19 bagi Ibu Hamil yang Akan Diberikan](#)

"Pelaku usaha penjualan langsung yang tidak memiliki perizinan berusaha dapat dikenakan ketentuan pidana.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja-Sektor Perdagangan," tegas Pohan

Terkait hal itu, Kepala BappebtiIndrasari Wisnu Wardhana mengimbau, masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan investasi di bidang perdagangan berjangka komoditi.

"Masyarakat dapat melakukan pengecekan legalitas pelaku usaha di www.bappebti.go.id," kata Wisnu.

Baca Juga: [Nama Depan Soeharto Diberikan Raja Fahd, Ini Kisahnya](#)

Sedangkan para pelaku usaha harus mematuhi aturan sesuai ketentuan.

"Para pelaku usaha diharapkan dapat mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi," kata Wisnu.

Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti Aldison menambahkan,

kegiatan pengamanan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang tidak taat ketentuan.

Baca Juga: [Tidak Perlu Pulang Kampung jika KTP Hilang di Daerah Rantau, Begini Cara Cetak Ulang](#)

Selain itu, harus memberikan contoh kepada pelaku usaha lain agar menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan.

"Kegiatan dilakukan [Kemendag](#) sebagai anggota satuan tugas Waspada Investasi untuk

menindaklanjuti keputusan Satgas yang telah melarang kegiatan usaha PT DNA Pro Akademi pada Januari 2022," katanya.***